

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pluralitas merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia, dan hal ini terjadi karena kondisi lingkungan fisik dan sosial budaya Indonesia yang beragam. Pluralitas masyarakat Indonesia terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Pertama, secara vertikal terdapat perbedaan strata antara lapisan atas, menengah, dan bawah, dan kedua, secara horizontal, terdapat unit sosial berdasarkan perbedaan agama, suku, adat, dan perbedaan daerah (Wasino dkk., 2019). Sebagai bangsa yang plural, di satu sisi, Indonesia memiliki kekayaan heterogenitas yang merupakan sebuah potensi untuk mewujudkan bangsa yang besar. Di sisi lain, kondisi masyarakat yang plural dapat memicu konflik dan disintegrasi bangsa (Kerebungu, Pangalila, & Umar, 2019).

Sejak berakhirnya masa rezim Orde Baru, kemajemukan bangsa Indonesia mendapatkan tantangan yang sangat berat. Pendekatan integrasi nasional represif yang dibangun oleh pemerintahan Soeharto terbukti rapuh. Setelah jatuhnya rezim, terjadi konflik yang berakar pada sentimen yang dipicu oleh identitas agama dan etnis (Hwang & Schulze, 2018; Schulze, 2017; Alganih, 2016; van Klinken, 2007). Reformasi yang ditandai dengan terciptanya kehidupan yang demokratis, telah menjadi wadah berkembangnya kelompok Islam radikal. Radikalisme dalam agama Islam telah bertumbuh secara intensif, hal ini dimanifestasikan dengan serangan teror dan kekerasan terhadap kepentingan Barat dan terhadap rumah ibadah agama lain (Raihani, 2012).

Provinsi Jawa Barat, yang berpusat di Kota Bandung, termasuk dalam kategori wilayah dengan indeks potensi konflik berlatar belakang agama tertinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia yang dirilis oleh *Wahid Foundation*, dalam rentang tahun 2016 sampai dengan 2019, Jawa Barat selalu masuk sebagai dua wilayah tertinggi dalam hal angka pelanggaran KBB secara nasional, bahkan pada tahun 2016 dan 2019, Jawa Barat berada di peringkat pertama (Wahid, 2016, 2017, 2018, 2019). Kemudian berdasarkan data indeks kerukunan beragama

Kemenag Republik Indonesia, Jawa Barat berada pada peringkat 3 terendah dari 34 provinsi di Indonesia, hanya lebih baik dari Aceh dan Sumatera Barat (Sila & Fakhruddin, 2020).

Kota Bandung sendiri, dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kota dengan angka intoleransi tertinggi di Indonesia. Indeks intoleransi Kota Bandung berada pada peringkat 4, dari seluruh kota di Indonesia (Setara Institute, 2020). Hal ini terjadi karena terdapat berbagai kebijakan dari pemerintah yang terkategori diskriminatif, diantaranya perlakuan terhadap warga Jemaah Ahmadiyah, kemudian permasalahan perizinan pembangunan rumah ibadah umat Kristen. Selain itu, beberapa tahun yang lalu juga terjadi pembubaran kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) umat Kristen di gedung Sabuga Jalan Tamansari oleh kelompok masyarakat Islam garis keras yang menyebutkan dirinya dengan nama Pembela *Ahlus Sunnah* (Wahyuni, 2016, hlm. 260-261).

Pada tahun 2019, sekelompok orang yang mengaku sebagai Paguyuban Pengawal NKRI, himpunan dari 27 Ormas yang ada di Kota Bandung, termasuk didalamnya Ormas Jawara Sunda dan Front Pembela Islam (FPI), melakukan pembubaran pada sebuah kegiatan Jemaah Ahmadiyah. Mereka menolak kegiatan peluncuran buku berjudul *Haqiqatul Wahy*, yang digelar di Masjid Mubarak, Bandung Timur. Massa aksi datang dengan membawa serta mobil komando yang mengibarkan bendera-bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid warna putih (Alazka, 2019). Atribut bendera tauhid hitam putih ini, di Indonesia biasanya dianggap sebagai identitas dari kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sebuah Ormas yang sejak tahun 2017 lalu telah dilarang keberadaannya.

Kelompok yang melakukan tindakan intoleransi ataupun kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam biasanya merujuk pada ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang tidak seimbang terhadap Islam, baik terlalu ke kiri ataupun sebaliknya terlalu ke kanan, akan menjadikan seseorang ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Meskipun faktor-faktor munculnya radikalisme dalam agama Islam sangat kompleks dan beragam, namun menurut Yusuf al-Qaradhawi, faktor utama lahirnya tindakan radikal dalam beragama, disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam dan pemahaman yang cenderung literalistik atas teks-teks

dalam agama Islam (Rodin, 2016). Bagi kelompok Islam radikal, dogma-dogma yang ada dalam ajaran agama Islam diterjemahkan secara dangkal dan disalahgunakan untuk melegitimasi segala tindakannya (Khamid, 2016).

Pada hakikatnya Islam merupakan agama universal dan moderat (*wasatiyah*) yang mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*). Pemahaman ini sebenarnya merupakan salah satu ajaran utama dalam Islam, yang setara dengan berbagai ajaran lain, seperti kebijaksanaan (*hikmah*), kasih sayang (*rahmah*) dan keadilan ('*adl*). Sebagai kitab suci yang diturunkan bagi umat Islam, Alquran juga memberikan pengakuan terhadap kemajemukan keyakinan dan keberagaman. Secara eksplisit Alquran menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (*laa ikroha fiddiin*). Tetapi pemahaman ini tidak berlaku bagi kelompok Islam radikal, beberapa ayat dalam Alquran dan Hadis justru digunakan untuk membenarkan perilaku intoleransi dan diskriminasi, bahkan menjustifikasi tindakan peperangan atas nama agama (Arkoun dalam Rodin, 2016).

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang pesat membuat penyebaran pemahaman radikalisme menjadi lebih mudah, salah satunya melalui media sosial. Keberadaan media sosial membuat masyarakat semakin mudah menerima dan berbagi informasi tentang radikalisme (Sunarto, 2017). Hal ini diperparah dengan perilaku pengguna media sosial di Indonesia yang cenderung tidak selektif dan mudah termakan informasi hoax (Rahadi, 2017). Media sosial harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, mengingat besarnya jumlah penggunanya. Berdasarkan data digital yang dirangkum oleh *We Are Social dan Hootsuite* (2020), secara global Indonesia menempati peringkat ketiga pengguna media sosial aktif. Pengguna media sosial aktif di Indonesia berjumlah 160 juta, artinya lebih separuh dari populasi penduduk Indonesia merupakan pengguna media sosial.

Ledakan penggunaan media sosial di Indonesia telah secara dramatis mengubah cara informasi dibuat, disebarluaskan, dan didistribusikan (Lim, 2017). Seharusnya masifnya penggunaan media sosial ini, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama. Akan tetapi pada kenyataannya kecenderungan hari ini justru sebaliknya, media sosial malah menjadi wadah bagi berbagai pihak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme.

Saat ini kelompok radikal banyak memanfaatkan keberadaan internet. Mereka paham bahwa ini adalah metode yang sangat efektif dan efisien untuk menyebarkan doktrinnya (Sunarto, 2017). Beberapa kelompok Islam radikal juga menggunakan media sosial untuk tujuan gerakannya (Muthohirin, 2015). Selain itu media sosial turut dimanfaatkan sebagai katalis tindakan kekerasan dan alat propaganda bagi aktivis kelompok Islam radikal untuk mendapatkan dukungan (Sari, 2017).

Keadaan dimana media sosial telah dimanfaatkan dan mempunyai posisi penting dalam indoktrinasi radikalisme merupakan sebuah kenyataan di Indonesia. Gerakan Islam radikal telah terbukti menggunakan media sosial untuk melakukan amplifikasi tujuan organisasinya. Bahrudin Naim, seorang anggota ISIS di Indonesia yang melakukan teror bom Sarinah, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemahamannya (Selamat, 2016). Santoso, tokoh sentral Mujahidin Indonesia Timur (MIT) juga telah menjadikan aplikasi berbagi video, Youtube, sebagai media propaganda untuk mengirimkan pesan yang mengandung teror dan ancaman terhadap keamanan dan pemerintah Indonesia (Ismail, 2016). Hal ini memberikan bukti bahwa kelompok Islam radikal telah mahir dalam menyampaikan pesan mereka secara digital untuk mempengaruhi para pengguna media sosial.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah terkait konflik berlatar identitas agama ini belum bisa dikatakan optimal, koordinasi antar instansi terkait, masih sangat lemah, dan belum ada menghasilkan pencegahan yang efektif (*Human Rights Watch*, 2018). Pemecahan masalah Islam radikal dari sisi pemerintah, selama ini memang lebih difokuskan pada langkah represif setelah tindakan terjadi, belum ditekankan pada langkah preventif, sebelum terjadinya tindakan. Oleh karena ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sipil, terutama kelompok Islam yang moderat, untuk dapat berperan aktif melakukan penanaman nilai-nilai multikultural melalui media sosial, sehingga dapat menahan penyebaran radikalisme melalui dunia maya.

Pemanfaatan media sosial sebagai wadah penanaman nilai-nilai multikultural telah diusahakan oleh berbagai pihak, berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan salah satu pihak yang konsisten dalam melakukan penanaman nilai-nilai multikultural melalui media sosial adalah

Jaringan Gusdurian. Menurut hasil penelitian Farida (2016) jaringan ini memanfaatkan media sosial dalam strategi untuk mencapai tujuan gerakannya. Studi lain dari Putri dan Jatiningsih (2018) menyimpulkan fokus tujuan gerakan Gusdurian salah satunya adalah Islam yang moderat. Mereka mencoba mengimplementasikan nilai-nilai moderat berbasis keislaman pada masyarakat. Tujuannya untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal, sehingga terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera.

Jaringan Gusdurian sendiri sudah muncul dan berkembang sejak tahun 2010, beberapa bulan setelah wafatnya Gus Dur. Jaringan Gusdurian merupakan wadah gerakan sosial bagi para Gusdurian di ruang kultural dan non politik praktis. Gusdurian sendiri merupakan sebutan bagi individu, komunitas atau forum lokal, dan organisasi yang merasa terinspirasi oleh teladan nilai, pemikiran, dan perjuangan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), seorang cendekiawan Islam, yang juga merupakan Presiden Indonesia yang ke empat. Berkat kegigihannya memperjuangkan keadilan bagi minoritas di Indonesia, Gus Dur diakui sebagai bapak pluralisme Indonesia (Khalil, 2016, hlm. 198). di antara jasanya yang paling dikenang adalah penetapan Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia, dan menetapkan hari libur nasional untuk enam agama resmi di Indonesia ketika menjabat sebagai presiden.

Gus Dur secara pribadi memiliki pemikiran yang sejalan dengan nilai-nilai multikultural. Pemikiran Gus Dur tentang Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya adalah mengenai prinsip-prinsip humanisme dan pluralitas masyarakat (Miskan, 2017). Dengan Menggunakan tagline “Islam ramah, bukan Islam marah”, Jaringan Gusdurian mencoba menghilangkan stigma radikal, ekstrimis, teroris dan label garis keras lainnya dari identitas Islam di Indonesia. Jaringan Gusdurian memanfaatkan seluruh akun media sosial yang dimilikinya, untuk melakukan penanaman nilai-nilai multikultural yang dipahaminya (Sarkadi, Suhadi, & Sani, 2019; Septiawan, 2017).

Gerakan sosial Jaringan Gusdurian hingga saat ini konsisten dalam mempertahankan karakteristiknya sebagai gerakan Islam moderat, tidak terlibat politik praktis, dan menjaga informalitas dari sisi pengorganisasiannya. Atas

perjuangannya mempromosikan hak asasi manusia, multikulturalisme, konsolidasi masyarakat sipil, demokrasi, toleransi, dan dialog antar umat agama, pada akhir tahun 2018 yang lalu, simpul gerakan mereka yang disebut Jaringan Gusdurian diberikan penghargaan *Asia Democracy and Human Rights Award 2018* oleh *The Taiwan Foundation for Democracy* (TFD), sebuah yayasan bantuan demokrasi nasional pertama di Asia.

Saat ini, komunitas Gusdurian tersebar hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, bahkan di beberapa kota di dunia. Terbukti pada kegiatan Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian di tahun 2020 yang lalu, dihadiri oleh lebih dari seratus Komunitas Gusdurian dari berbagai wilayah (gusdurian.net, 2020), termasuk didalamnya Gusdurian Bandung. Dibandingkan dengan Jaringan Gusdurian lain, Gusdurian Bandung termasuk Gusdurian yang paling aktif di media sosial, terbukti dari jumlah pengikutnya di media sosial, termasuk yang tertinggi, terutama pada media sosial Instagram. Padahal komunitas Gusdurian sendiri memiliki irisan dengan organisasi kemasyarakatan Islam Nahdhatul Ulama (NU), yang secara kuantitatif bukanlah kelompok mayoritas di Kota Bandung. Gusdurian sendiri banyak digerakkan oleh kalangan muda yang memiliki latar tradisi santri pesantren yang bercorak NU (Riza, 2019).

Menarik untuk ditelusuri bagaimana gerakan dari Gusdurian Bandung dalam menanamkan nilai-nilai multikultural yang ada di wilayah Kota Bandung, melalui akun media sosial yang mereka miliki. Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “PENANAMAN NILAI-NILAI MULTIKULTURAL BERBASIS KEISLAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Fenomenologi pada Gusdurian Bandung)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penanaman nilai-nilai multikultural berbasis keislaman melalui media sosial yang dilakukan oleh Gusdurian Bandung?”

Adapun rumusan masalah khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja Nilai-Nilai Multikultural Berbasis Keislaman yang ditanamkan oleh Gusdurian Bandung melalui media sosial?
- b. Bagaimana proses penanaman nilai-nilai multikultural berbasis keislaman yang dilakukan oleh Gusdurian Bandung melalui media sosial?
- c. Apa saja hambatan yang dihadapi Gusdurian Bandung dalam menanamkan nilai-nilai multikultural berbasis keislaman melalui media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang penanaman nilai-nilai multikultural berbasis keislaman melalui media sosial yang dilakukan oleh Gusdurian Bandung.

Kemudian tujuan khusus yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi nilai-nilai multikultural berbasis keislaman yang ditanamkan oleh Gusdurian Bandung melalui media sosial.
- b. Mendeskripsikan proses penanaman nilai-nilai multikultural berbasis keislaman yang dilakukan oleh Gusdurian Bandung melalui media sosial.
- c. Menganalisis hambatan yang dihadapi Gusdurian Bandung dalam menanamkan nilai-nilai multikultural berbasis keislaman melalui media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini ditujukan pada beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Pada tatanan teoretis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya dan menambah wawasan dalam bidang keilmuan pendidikan sosiologi, khususnya dalam bidang pendidikan multikultural pada masyarakat di era digital, sebagai penyeimbang pendidikan multikultural yang ditanamkan melalui lembaga pendidikan formal.
2. Pada tatanan kebijakan, hasil penelitian ini harapannya dapat dijadikan rujukan mengenai realitas implementasi nilai-nilai multikultural berbasis

keislaman di era digital, sehingga dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan dalam upaya membumikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat.

3. Pada tatanan praktis, bagi peneliti secara pribadi, penelitian ini dapat menambah pengalaman dan pemahaman, serta penerapan ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan. Kemudian bagi pembaca dan masyarakat secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya yang dilakukan Gusdurian Bandung dalam menanamkan nilai-nilai multikultural berbasis keislaman pada era digital. Terakhir, bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis ini disusun dalam lima bab, tujuannya agar tesis ini dapat dipahami dengan mudah oleh berbagai pihak, sebagaimana berikut ini:

- BAB I** : Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi tesis, sebagai pondasi berfikir dari permasalahan penelitian.
- BAB II** : Kajian pustaka. Pada bab ini peneliti menjelaskan konsep, prinsip dan teori yang menjadi kerangka analisis pada bab IV. Selain itu juga menjelaskan berbagai dokumen atau data sebagai pendukung dalam penelitian.
- BAB III** : Metode penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan kerangka metodologis dalam penelitian ini, meliputi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.
- BAB IV** : Temuan dan pembahasan. Dalam bab ini peneliti menguraikan dan menganalisis hasil penelitian di lapangan, terkait penanaman nilai-nilai multikultural berbasis keislaman yang dilakukan oleh Gusdurian Bandung melalui media sosial.
- BAB V** : Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Dalam bab ini peneliti menyajikan penafsiran terhadap hasil analisis temuan dan

pembahasan penelitian sekaligus merekomendasikan hal-hal penting yang dapat merekomendasikan dari hasil penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian tesis ini.